



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG  
PERTAHANAN (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE  
D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF  
A LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*), pada tanggal 28 Juni 2021 di Paris, Prancis;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE*).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*), yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2021 di Paris, Prancis.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Prancis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2024  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2024  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 237730 A



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG  
PERTAHANAN (*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE  
D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
RELATIF A LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE*)**

**I. UMUM**

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Prancis diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:

- a. tujuan dari Persetujuan;
- b. otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan;
- c. ruang lingkup kerja sama meliputi:
  1. bidang kerja sama antara Para Pihak berupa:
    - a) kerja sama intelijen di bidang pertahanan;
    - b) pendidikan dan pelatihan;
    - c) ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
    - d) pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan, dan terorisme;
    - e) peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan; dan
    - f) bidang kerja sama lain terkait pertahanan, sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.
  2. kerja sama berupa:
    - a) dialog dan konsultasi strategis bilateral;
    - b) pertukaran kunjungan;
    - c) latihan militer; dan
    - d) bidang kerja sama lain terkait dengan pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.
- d. kerangka tata kelola pola organisasi yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- e. urusan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- f. status pasukan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- g. ganti rugi yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan;
- h. hak kekayaan intelektual yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- i. keamanan informasi rahasia yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
- j. penyelesaian perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan; dan
- k. ketentuan akhir Persetujuan.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7008**



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Indonesia",  
dan

Pemerintah Republik Prancis, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Prancis",

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak",

**Menegaskan** komitmen mereka untuk mendukung tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945;

**Mengingat** Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Prancis yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011, dengan tujuan meningkatkan kontribusi kedua negara untuk perdamaian dan pembangunan umat manusia;

**Memperhatikan** Pernyataan Kehendak antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Prancis tentang Peningkatan Kerja Sama Pertahanan yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2017;

**Berkeinginan** untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya, dan dialog;

**Mengakui** perlunya memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama teknis yang telah ada berdasarkan penghormatan penuh atas hak kedaulatan dan keutuhan wilayah serta prinsip kesetaraan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menguntungkan;



**Memperhatikan** peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-masing;

**Telah menyetujui** hal-hal sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DEFINISI**

Dalam Persetujuan ini, istilah-istilah:

- a. "Angkatan Bersenjata" berarti satuan dan satuan gabungan dari angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut ataupun korps militer lainnya serta unsur lintas matra dan pendukung dari masing-masing Pihak;
- b. "Anggota Personel" berarti personel Angkatan Bersenjata dari masing-masing Pihak, serta personel sipil yang bertugas untuk berbagai kementerian yang berwenang di bidang pertahanan dan yang ikut serta dalam kegiatan kerja sama yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

## **PASAL 2**

### **TUJUAN**

1. Persetujuan ini menetapkan bidang dan bentuk kerja sama antara Para Pihak di bidang pertahanan. Jika diperlukan, Persetujuan ini dapat dilengkapi dengan ketentuan mengenai status pasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Pelaksanaan Persetujuan ini didasarkan pada asas resiprositas dan saling menguntungkan.

## **PASAL 3**

### **OTORITAS BERWENANG**

Otoritas berwenang, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Persetujuan ini, selanjutnya disebut sebagai "Otoritas Berwenang" adalah:

- a. untuk Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia;
- b. untuk Pemerintah Republik Prancis, Menteri Pertahanan Republik Prancis.

## **PASAL 4**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Bidang kerja sama antara Para Pihak dapat mencakup:
  - a. kerja sama intelijen di bidang pertahanan;

- b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
  - d. pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme;
  - e. peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan;
  - f. bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.
2. Kerja sama antara Para Pihak dapat berupa:
- a. dialog dan konsultasi strategis bilateral;
  - b. pertukaran kunjungan;
  - c. latihan;
  - d. bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.
3. Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3 dapat menetapkan pengaturan teknis dan prosedur pelaksanaan untuk mewujudkan bidang dan bentuk kerja sama yang disebutkan dalam butir 1 dan 2.

## **PASAL 5**

### **KERANGKA TATA KELOLA – POLA ORGANISASI**

1. Para Pihak akan membentuk suatu komite bersama yang bertugas mengatur pelaksanaan Persetujuan ini, selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama".
2. Komite Bersama akan memberikan arah kebijakan dan panduan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama yang ditentukan dalam Persetujuan ini. Untuk itu, Komite Bersama akan secara khusus bertanggung jawab atas tugas berikut:
- a. identifikasi hal-hal yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama;
  - b. rekomendasi kegiatan dan program kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini;
  - c. penentuan secara bersama-sama tentang Pihak yang akan memimpin kegiatan kerja sama tertentu;
  - d. penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dan program kerja sama tertentu, jika diperlukan;
  - e. saran, prakarsa, koordinasi, dan penilaian kegiatan kerja sama tertentu;
  - f. reviu dan evaluasi pelaksanaan Persetujuan ini;
  - g. penyerahan laporan bersama dari pertemuan Komite Bersama kepada Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3.

3. Komite Bersama akan diketuai bersama oleh seorang wakil dari masing-masing Pihak, yaitu Direktur Jenderal Strategi Pertahanan untuk Pihak Indonesia dan Direktur Jenderal Hubungan Internasional dan Strategi (DGRIS) untuk Pihak Prancis, atau perwakilan masing-masing Pihak yang ditunjuk, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Ketua Bersama" dan masing-masing sebagai "Ketua Bersama".
4. Komite Bersama akan terdiri dari perwakilan dari kedua Pihak. Para Pihak bersama-sama menentukan jumlah perwakilan dari masing-masing Pihak sebelum setiap pertemuan yang dijadwalkan.
5. Komite Bersama akan mengadakan pertemuan formal setiap tahunnya, dan jika diperlukan, pada kesempatan tambahan atas prakarsa salah satu Pihak, secara bergantian di Indonesia dan di Prancis, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. Para Ketua Bersama akan secara bersama-sama menentukan tanggal, tempat, dan agenda setiap pertemuan Komite Bersama.
6. Jika diperlukan, Komite Bersama akan bertumpu pada berbagai subkomite dwinasional untuk mendukungnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan membantunya mengawasi dan mengelola kegiatan di bidang tertentu. Berbagai subkomite tersebut didefinisikan dalam Lampiran Persetujuan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan darinya. Jika diperlukan, berbagai subkomite tersebut akan bertumpu pada kelompok kerja.
7. Komite Bersama akan mengawasi dan mengontrol kegiatan setiap subkomite ataupun kelompok kerja. Masing-masing harus melapor kepada Komite Bersama setahun sekali atau atas permintaan Komite Bersama.

## **PASAL 6 URUSAN KEUANGAN**

Setiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing yang dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya, kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak.

## **PASAL 7 STATUS PASUKAN**

Para Pihak akan berupaya membuat kesepakatan bilateral tentang status Anggota Personel mereka dan orang yang menjadi tanggungan mereka.



## **PASAL 8 GANTI RUGI**

1. Masing-masing Pihak melepaskan segala tuntutan ganti rugi terhadap Pihak lainnya ataupun Anggota Personelnya, atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Anggota Personelnya ataupun harta bendanya oleh Anggota Personel Pihak lainnya selama dinas ataupun saat menjalankan tugasnya, dalam kerangka kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini ataupun sehubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini, kecuali jika terjadi pelanggaran serius ataupun disengaja dari Anggota Personel Pihak lainnya, yang dalam hal ini biaya tanggung jawab akan ditanggung oleh Pihak itu sendiri.

Pelanggaran serius berarti kesalahan besar ataupun kelalaian berat. Pelanggaran disengaja berarti kesalahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan kerugian.

Pihak yang anggota personelnya terlibat dalam melakukan pelanggaran menentukan apakah kesalahan tersebut bersifat serius ataupun disengaja.

Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan serius ataupun disengaja, nilai biaya yang terkait akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

2. Untuk tuntutan atas kerugian yang disebabkan oleh Anggota Personel salah satu Pihak selama dinas ataupun saat menjalankan tugasnya dalam kerangka Persetujuan ini, terhadap orang ataupun harta benda pihak ketiga, di wilayah Pihak lainnya:
  - a. Pihak yang wilayahnya merupakan tempat kejadian kerugian, wajib, dalam proses pengadilannya menggantikan Pihak negara asal pelanggar;
  - b. Beban kompensasi yang dibayarkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh salah satu Pihak ataupun salah seorang Anggota Personelnya kepada pihak ketiga akan dibagi antara Para Pihak sebagai berikut:
    - dalam hal satu Pihak bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, Pihak tersebut akan menanggung biaya kompensasi secara penuh;
    - dalam hal Para Pihak secara bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian, atau jika tidak mungkin untuk menentukan tanggung jawab atas kerusakan secara khusus terhadap salah satu Pihak, biaya total kompensasi akan dibagi rata antara Para Pihak;
    - tanggung jawab atas kerugian dan biaya kompensasi selanjutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

## **PASAL 9**

### **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kegiatan khusus yang diselenggarakan dalam kerangka Persetujuan ini tunduk pada persetujuan atau pengaturan selanjutnya. Pengaturan dimaksud akan dibuat sesuai dengan ayat 3 dari Pasal 4.

## **PASAL 10**

### **KEAMANAN INFORMASI RAHASIA**

1. Para Pihak akan berupaya membuat persetujuan keamanan terpisah tentang pertukaran dan perlindungan timbal balik dari informasi dan materi rahasia.
2. Sebelum ditandatangani Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk memberikan perlindungan yang diperlukan atas informasi rahasia yang dipertukarkan dalam kerangka pelaksanaan Persetujuan ini.

## **PASAL 11**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran ataupun pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara eksklusif melalui konsultasi dan negosiasi langsung antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

## **PASAL 12**

### **KETENTUAN AKHIR**

1. Para Pihak akan saling menyampaikan pemberitahuan, melalui saluran diplomatik, tentang pemenuhan persyaratan hukum domestik masing-masing yang diperlukan untuk keberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.
2. Persetujuan ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan otomatis akan diperpanjang secara terus-menerus untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksudkan.

3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi program dan kegiatan yang sedang berjalan dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.
4. Para Pihak dapat mengamendemen Persetujuan ini setiap saat dengan kesepakatan bersama dan tertulis, melalui saluran diplomatik. Keberlakuan amendemen tersebut tunduk pada ketentuan dalam ayat 1.
5. Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3 dapat mengamendemen Lampiran berdasarkan kesepakatan bersama dan tertulis.
6. Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan dan Veteran Republik Prancis yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012 akan dicabut setelah berlakunya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Paris, pada tanggal 28 JUNI 2021, dalam dua rangkap asli, dalam bahasa Indonesia dan Prancis, kedua naskah memiliki autentisitas yang sama.

**Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia**



**Prabowo Subianto**  
Menteri Pertahanan

**Untuk Pemerintah  
Republik Prancis**



**Florence Parly**  
Menteri Angkatan Bersenjata



**LAMPIRAN**  
**SUBKOMITE DAN KELOMPOK KERJA DWINASIONAL**

1. Subkomite dwinasional sebagaimana dimaksud dalam butir 5.6 Pasal 5 adalah: subkomite "Urusan Strategis", subkomite "Kerja Sama Militer", dan subkomite "Peralatan Pertahanan".
2. Subkomite "Urusan Strategis" akan diketuai bersama oleh perwakilan Para Pihak sebagai berikut, dalam kerangka tanggung jawab nasional mereka:
  - a. untuk Pihak Indonesia: Direktur Jenderal Strategi Pertahanan atau wakilnya;
  - b. untuk Pihak Prancis: Direktur Jenderal Hubungan Internasional dan Strategi (DGRIS) atau wakilnya.
3. Subkomite "Kerja Sama Militer" akan diketuai bersama oleh perwakilan Para Pihak sebagai berikut, dalam kerangka tanggung jawab nasional mereka:
  - a. untuk Pihak Indonesia: Kepala Pusat Kerja Sama Internasional TNI atau wakilnya;
  - b. untuk Pihak Prancis: Kepala Divisi Selatan untuk Kerja Sama Bilateral pada bagian Staf Umum Angkatan Bersenjata (EMA/PRIM/CBS) atau wakilnya.
4. Subkomite dwinasional "Peralatan Pertahanan" akan diketuai bersama oleh perwakilan Para Pihak sebagai berikut, dalam kerangka tanggung jawab nasional mereka:
  - a. untuk Pihak Indonesia: Direktur Jenderal Potensi Pertahanan atau wakilnya.
  - b. untuk Pihak Prancis: Direktur Asia-Pasifik pada Direktorat Pembangunan Internasional pada Direktorat Jenderal Persenjataan (DGA/DI/SDAP) atau wakilnya.



REPUBLIK INDONESIA

**ACCORD**  
**ENTRE**  
**LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE**  
**ET**  
**LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**  
**RELATIF A LA**  
**COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE**

Le Gouvernement de la République d'Indonésie, ci-après dénommé la « Partie indonésienne »,

et

le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé la « Partie française »,

ci-après collectivement dénommés les « Parties »,

**Confirmant** leur engagement en faveur des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945;

**Rappelant** la Déclaration commune sur le Partenariat stratégique entre l'Indonésie et la France, signée le 1<sup>er</sup> juillet 2011, dans le but de renforcer les contributions de nos deux pays en faveur de la paix et du développement de l'humanité;

**Tenant compte** de la Lettre d'intention (LoI) entre le Ministre de la Défense de la République d'Indonésie et le Ministre de la Défense de la République française, sur le développement de la coopération en matière de défense, signée le 29 mars 2017;

**Souhaitant** améliorer et renforcer leurs relations bilatérales actuelles au moyen d'activités de coopération dans le domaine de la défense, reposant sur des principes d'égalité, de confiance mutuelle et de dialogue ;



**Reconnaissant** la nécessité de renforcer leurs relations amicales et leur coopération technique existantes, sur la base du respect total du droit à la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des principes d'égalité, de non-ingérence dans les affaires internes et d'intérêt mutuel;

**Compte tenu** de la législation applicable dans leur Etat respectif;

Sont convenus de ce qui suit :

## **ARTICLE 1 DÉFINITIONS**

Dans le présent Accord, les termes :

- a) les « Forces armées » désignent les unités et formations de l'armée de terre, de l'air, de la marine ou tout autre corps militaire ainsi que les services interarmées et de soutien de l'une ou l'autre des Parties ;
- b) les « Membres du personnel » désignent le personnel appartenant aux Forces armées de l'une ou l'autre des Parties, ainsi que le personnel civil employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et participant aux activités de coopération établies par cet Accord.

## **ARTICLE 2 OBJET**

- 1. Le présent Accord établit les domaines et formes de coopération entre les Parties dans le domaine de la défense. Si nécessaire, le présent Accord peut être complété par des stipulations sur le statut des forces telles que celles prévues à l'article 7.
- 2. La mise en œuvre de cet Accord repose sur le principe de réciprocité et d'intérêt mutuel.

## **ARTICLE 3 AUTORITÉS COMPÉTENTES**

Les autorités compétentes, responsables de la mise en œuvre de cet Accord, ci-après dénommées « Autorités compétentes », sont :

- a) pour le Gouvernement de la République d'Indonésie, le Ministre de la Défense de la République d'Indonésie;
- b) pour le Gouvernement de la République française, le Ministre de la Défense de la République française.

## **ARTICLE 4**

### **ÉTENDUE DE LA COOPÉRATION**

1. Les domaines de coopération entre les Parties peuvent inclure:
  - a) la coopération en matière de renseignement dans le domaine de la défense ;
  - b) l'enseignement et la formation;
  - c) la science et la technologie dans le secteur de l'industrie de défense ;
  - d) le maintien de la paix, l'aide humanitaire et les secours aux sinistrés, la lutte contre la piraterie et le terrorisme ;
  - e) l'équipement de défense, la production commune, la recherche et le développement et le soutien ;
  - f) tout autre domaine de coopération lié à la défense, défini par accord mutuel entre les Parties.
2. La coopération entre les Parties peut prendre les formes suivantes :
  - a) des dialogues et consultations stratégiques bilatéraux ;
  - b) des voyages d'échange ;
  - c) des exercices ;
  - d) toute autre activité de coopération liée à la défense, définie par accord mutuel entre les Parties.
3. Les Autorités compétentes désignées à l'article 3 peuvent conclure des arrangements techniques et des procédures de mise en œuvre afin de réaliser les domaines et formes de coopération mentionnés aux points 1 et 2.

## **ARTICLE 5**

### **CADRE DE GOUVERNANCE – ORGANISATION**

1. Les Parties créent un comité conjoint chargé de gérer la mise en œuvre de cet Accord, ci-après dénommé le « Comité conjoint ».
2. Le Comité conjoint donne des indications stratégiques et des conseils sur toutes les activités liées à la coopération définie dans le cadre du présent Accord. À ces fins, le Comité conjoint prend tout particulièrement en charge les tâches suivantes:
  - a) l'identification des préoccupations et intérêts communs;
  - b) la recommandation des activités et programmes de coopération dans le cadre du présent Accord ;
  - c) la détermination mutuelle de la Partie chargée de conduire des activités spécifiques de coopération;
  - d) l'organisation et la mise en œuvre d'activités et programmes spécifiques de coopération, si nécessaire ;
  - e) la recommandation, l'initiation, la coordination et l'évaluation d'activités

- spécifiques de coopération ;
- f) l'examen et l'évaluation de la mise en œuvre du présent Accord ;
  - g) la soumission d'un rapport conjoint de ses assemblées aux Autorités compétentes, désignées à l'article 3.
3. Le Comité conjoint est co-présidé par un représentant de chaque Partie, à savoir le Directeur Général pour la Stratégie de Défense pour la Partie indonésienne et le Directeur Général des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS) pour la Partie française ou leurs représentants désignés respectifs, ci-après collectivement dénommés les « Co-présidents » et individuellement un « Co-président ».
  4. Le Comité conjoint se compose de représentants des deux Parties. Les Parties déterminent mutuellement le nombre de représentants issus de chacune d'entre elles, avant la tenue de chaque assemblée.
  5. Le Comité conjoint tient une assemblée formelle chaque année et si nécessaire, en d'autres occasions, à l'initiative de l'une ou l'autre des Parties, par alternance, en Indonésie et en France, sauf spécification contraire des Parties. Les Co-présidents doivent mutuellement fixer la date, le lieu et l'ordre du jour de chaque assemblée.
  6. Si nécessaire, le Comité conjoint s'appuie sur les sous-comités binationaux qui l'assistent dans l'exercice de ses responsabilités et l'aident à superviser et gérer les activités dans un domaine spécifique. Ces sous-comités sont définis en annexe au présent Accord, laquelle en fait partie intégrante. Si nécessaire, les sous-comités s'appuient eux-mêmes sur des groupes de travail.
  7. Le Comité conjoint maintient une surveillance et un contrôle sur les activités de chaque sous-comité ou groupe de travail. Chacun d'entre eux rend des comptes au Comité conjoint une fois par an ou à la demande du Comité conjoint.

## **ARTICLE 6**

### **QUESTIONS FINANCIÈRES**

Sauf accord contraire entre les Parties, chaque Partie prend en charge les frais respectifs qu'elle a engagés dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, conformément à ses dotations budgétaires.

## **ARTICLE 7**

### **STATUT DES FORCES**

Les Parties s'efforcent de conclure un accord bilatéral sur le statut des Membres de leur personnel et de leurs personnes à charge.



## **ARTICLE 8**

### **RÈGLEMENT DES DOMMAGES**

1. Chaque Partie renonce à toutes demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie ou les Membres de son personnel, pour les dommages causés aux Membres de son personnel ou à ses biens par des Membres du personnel de l'autre Partie, pendant le service ou dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre des activités de coopération prévues par le présent Accord ou en lien avec la mise en œuvre du présent Accord, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle du Membre du personnel de l'autre Partie. Dans ce dernier cas, la Partie concernée supporte seule le coût de la réparation.

Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

Il incombe à la Partie dont dépend le Membre du personnel mis en cause de déterminer le caractère lourd ou intentionnel de la faute.

En cas de dommages découlant d'une faute lourde ou intentionnelle, le montant des coûts afférents est déterminé par accord mutuel entre les Parties.

2. Concernant les réclamations pour des dommages causés à la personne d'un tiers ou à ses biens par le Membre du Personnel d'une Partie pendant le service ou dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de cet Accord, sur le territoire de l'autre Partie :
  - a) la Partie sur le territoire de laquelle les dommages ont été causés se substitue, dans les procédures engagées devant ses juridictions, à la Partie dont relève le Membre du personnel mis en cause dans l'instance ;
  - b) la charge des indemnités versées à des tiers pour la réparation des dommages causés par une Partie ou un Membre de son personnel est répartie entre les Parties de la manière suivante:
    - si une Partie est seule responsable des dommages, cette Partie supporte l'intégralité du coût consacré à la réparation;
    - si les Parties sont conjointement responsables des dommages ou s'il est impossible d'attribuer spécifiquement la responsabilité à l'une ou l'autre Partie, le coût total consacré à la réparation est alors réparti à parts égales entre les Parties ;
    - la responsabilité des dommages et le coût ultérieur de la réparation sont déterminés par accord mutuel entre les Parties.

## **ARTICLE 9**

### **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux activités spécifiques mises en œuvre dans le cadre de cet Accord, sont traités conformément à des accords ou arrangements subséquents. Ces arrangements sont conclus conformément au point 3 de l'article 4.

## **ARTICLE 10**

### **SÉCURITÉ DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES**

1. Les Parties s'efforcent de conclure un accord de sécurité dédié à l'échange et à la protection réciproque des informations et matériels classifiés.
2. Dans l'attente de la conclusion de l'accord visé au point 1, chaque partie peut demander à l'autre Partie de lui fournir la protection nécessaire des informations classifiées échangées dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.

## **ARTICLE 11**

### **RÉSOLUTION DES LITIGES**

Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de consultations et de négociations directes entre les Parties, menées par les canaux diplomatiques.

## **ARTICLE 12**

### **DISPOSITIONS FINALES**

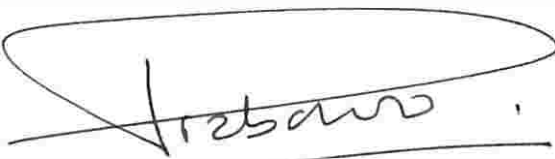
1. Les Parties se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs exigences juridiques nationales respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des deux notifications.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq (5) ans. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie au moins six (6) mois avant la date à laquelle cette Partie souhaite que la dénonciation prenne effet.
3. Sauf décision contraire de la part des Parties, la dénonciation du présent Accord n'affecte pas les programmes et activités en cours de réalisation dans le cadre du présent Accord.

4. Les Parties peuvent à tout moment amender le présent Accord par consentement mutuel et écrit, par la voie diplomatique. L'entrée en vigueur de cet amendement est régie par les dispositions du point 1.
5. Les Autorités compétentes désignées à l'article 3 peuvent amender l'annexe par consentement mutuel et écrit.
6. L'entrée en vigueur du présent Accord met fin à l'Arrangement technique relatif à des activités de coopération en matière de défense entre le ministère de la défense de la République d'Indonésie et le ministre de la défense et des anciens combattants de la République française, signé le 29 février 2012.

EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 28 JUIN 2021, en deux exemplaires originaux, chacun en langues indonésienne et française, les deux textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA  
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE



**Prabowo Subianto**  
Ministre de la défense

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



**Florence Parly**  
Ministre des armées



**ANNEXE**  
**SOUS-COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL BINATIONAUX**

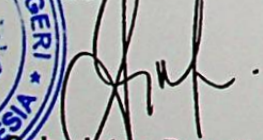
1. Les sous-comités binationaux, mentionnés au point 5.6 de l'article 5 sont les suivants : le sous-comité des « Affaires stratégiques », le sous-comité de la « Coopération militaire » et le sous-comité de « l'Équipement de défense ».
2. Le sous-comité des « Affaires stratégiques » est co-présidé par les représentants suivants des Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales :
  - a) pour la Partie indonésienne : le Directeur Général pour la Stratégie de Défense ou son adjoint(e) ;
  - b) pour la Partie française : le Directeur Général des Relations Internationales et de la Stratégie (DGRIS) ou son adjoint(e).
3. Le sous-comité de la « Coopération militaire » est co-présidé par les représentants suivants des Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales :
  - a) pour la Partie indonésienne : le Chef du Centre de la coopération internationale de l'armée nationale indonésienne ou son adjoint(e) ;
  - b) pour la Partie française : le Responsable de la division Sud de la coopération bilatérale de l'État-major des armées (EMA/PRIM/CBS) ou son adjoint(e).
4. Le sous-comité binational de « l'Équipement de défense » est co-présidé par les représentants suivants des Parties, dans le cadre de leurs attributions nationales :
  - a) pour la Partie indonésienne : le Directeur général du potentiel de défense ou son adjoint(e) ;
  - b) pour la Partie française : le Directeur pour l'Asie-Pacifique de la Direction Internationale du Développement de la Direction Générale de l'Armement (DGA/DI/SDAP) ou son adjoint(e).

Salinan naskah resmi

Certified true copy

Nomor : 00164/CTC/08/2022/52

Number



Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia  
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties  
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 24 Agustus 2022  
Date

